

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diharapkan setiap daerah dapat dengan mandiri mengurus dan mengatur masalah pemerintahan di daerahnya masing-masing. Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Kota Batam nyatanya melahirkan suatu permasalahan yaitu adanya permasalahan tumpang tindih (dualisme) kewenangan antara Badan Pengusahaan dengan Pemerintah Kota Batam (Zaenuddin, 2017).

Pada tahun 1971, Pulau Batam dibentuk sebagai daerah industri yang dikelola oleh Badan Otorita Daerah Industri Batam sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan dan membangun prasarana yang diperlukan daerah industri. Ketua Otorita diberikan kewenangan dalam peruntukan dan penggunaan seluruh areal tanah (hak pengelolaan lahan) di Pulau Batam.

Pada periode pembangunan B.J Habibe (Ketua Otorita Batam ke-3) terjadi perkembangan yang cukup pesat dalam jumlah kependudukan di Batam. Hal ini dikarenakan sudah tersedianya infrastruktur pendukung kegiatan industri seperti listrik, telekomunikasi, jalan, perumahan, pelabuhan laut, waduk dan

bandara, sehingga banyak investor yang menanamkan modalnya di Batam dan beberapa perusahaan besar sudah dibangun di Batam yang memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat.

Melihat pertumbuhan penduduk di Batam yang cukup pesat, maka diusulkan untuk membentuk pemerintahan daerah yang mengurus masalah administrasi kependudukan dan kemasyarakatan yang menyediakan fasilitas pelayanan jasa administrasi pemerintahan (Humas Badan Pengusahaan Batam, 2020). Hal ini dikarenakan Otorita Batam tidak mengurus urusan administrasi kependudukan dan kemasyarakatan, Otorita Batam hanya mengurus permasalahan lahan dan pembangunan industri di Kota Batam. Akhirnya Kotamadya Administrasi Batam secara resmi didirikan yang kemudian berubah status menjadi daerah otonomi sejak diberlakukannya kebijakan otonomi di Indonesia (Yakub, 2015:66).

Pelaksanaan otonomi di Kota Batam menyebabkan dualisme kewenangan antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batam (Dalla, 2018). Dualisme ini mengakibatkan berbagai persoalan dalam bidang perizinan, pengelolaan lahan, kepastian hukum dan lain sebagainya, sehingga terjadi inefisiensi waktu, uang dan tenaga bagi masyarakat maupun investor.

Tabel 1.1

Dualisme Kewenangan Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota
Batam

Aspek	Kewenangan	
	Badan Pengusahaan Batam	Pemerintah Kota Batam
Lahan	Mengelola seluruh areal tanah di Kota Batam dan berhak untuk menerima pembayaran UWTO atas penggunaan lahan melalui	Mengelola lahan sebagai urusan pemerintah kongruen sehingga berhak untuk menerima pembayaran PBB oleh masyarakat
Perijinan	Memberikan ijin usaha dan lainnya yang dibutuhkan oleh pengusaha	Memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin pada pelaku usaha
Pelabuhan	Memiliki fungsi sebagai tempat mengembangkan usaha, penyedia dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan termasuk pelabuhan laut	Melaksanakan pembangunan pelabuhan laut dan izin mengoperasikan pelabuhan laut untuk pelabuhan pengumpan
Bandar Udara	Bandar Udara Hang Nadim Batam merupakan satu-satunya Bandar Udara yang tanggung jawab dan kewenangan penyelenggaranya tidak berada di tangan Menteri dan perusahaan tidak melalui PT Angkasa Pura melainkan BP Batam	Otoritas Bandar Udara ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan dan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat

Sumber: (Zaenuddin, 2017)

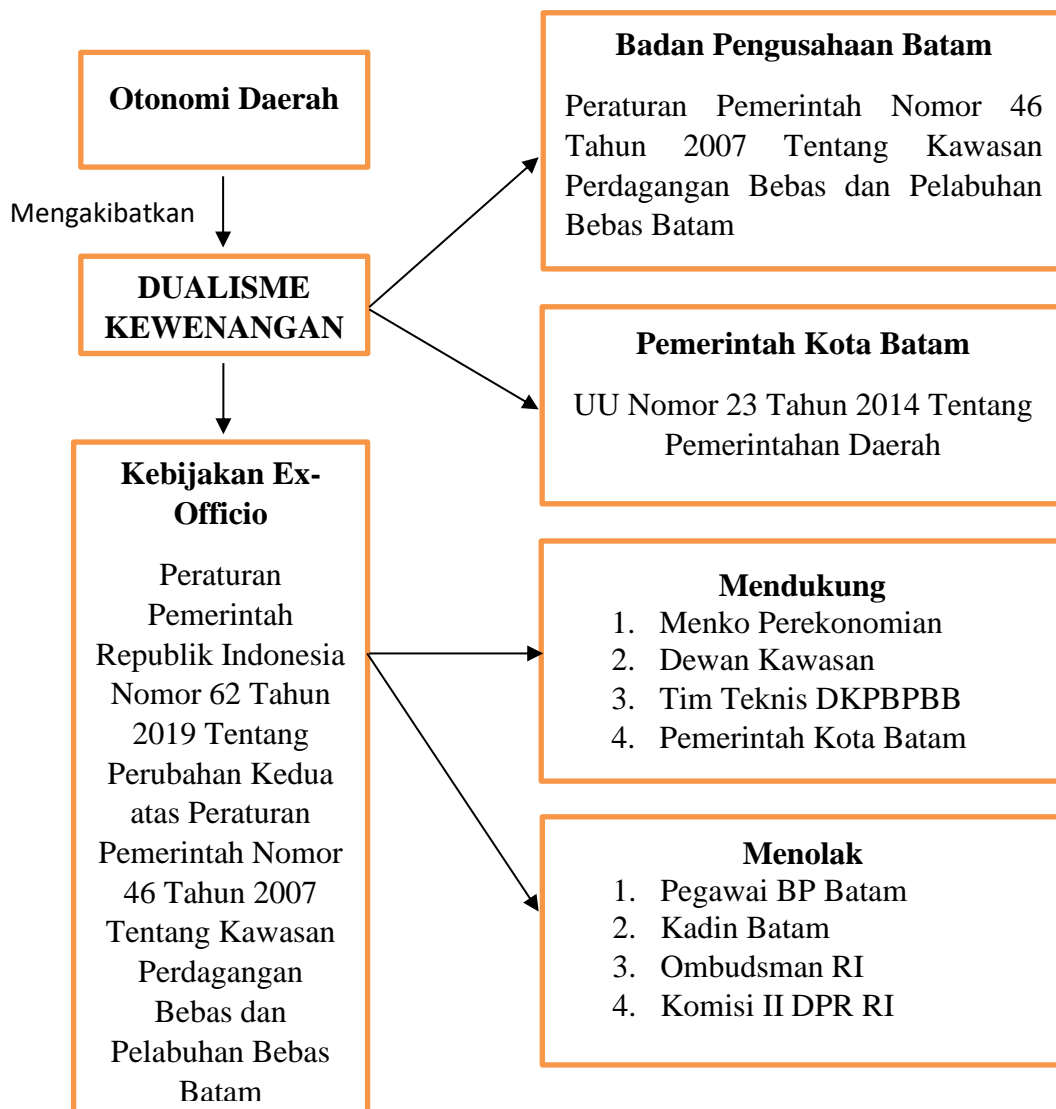
Dalam mengatasi permasalahan dualisme di Kota Batam maka Pemerintah Pusat membuat keputusan yakni Walikota Batam merangkap jabatan sebagai Ketua Badan Pengusahaan Batam yang melakukan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kota Batam yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pencanangan keputusan ini tidak sepenuhnya didukung oleh banyak pihak. Ketua KADIN Batam, DPR RI Komisi II dan Ombudsman ikut menolak pencanangan keputusan *ex-officio* dikarenakan keputusan ini melanggar peraturan dimana pelaksana negara dilarang merangkap sebagai komisiaris atau pengurus organisasi usaha (Komisi II, 2019). Pihak-pihak yang tidak setuju dengan rencana penerapan *ex-officio* menganggap keputusan ini bukanlah solusi dalam mengakhiri masalah dualisme di Kota Batam.

Gambar 1.1

Fungsi Badan Pengusahaan dan Pemerintah Kota Batam setelah diberlakukannya

Otonomi Daerah



Sumber: Diolah oleh penulis, 2019

Berangkat dari latar permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai perubahan struktur organisasi Badan Pengusahaan Kota Batam dengan pertanyaan penelitian “Mengapa terjadi perubahan struktur organisasi Badan Pengusahaan Batam dalam kebijakan Ex-Officio.” Adapun

batasan dalam penelitian ini ialah peneliti hanya meneliti konteks aktor di tingkat lokal (Kota Batam) saja dikarenakan adanya keterbatasan penulis dalam memperoleh informasi dan juga narasumber di tingkat provinsi dan nasional. Adapun konsekuensi hasil dalam penelitian ini ialah, penulis hanya menekankan pada *history* mengapa kebijakan *ex officio* dilaksanakan di Kota Batam serta bentuk peran serta dari aktor tingkat lokal saja. Sehingga hasil penelitian ini tidak dapat mendeskripsikan peran serta kepentingan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan dan kedudukan yang dominan terkait perumusan kebijakan *ex-officio* di Kota Batam. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, peneliti menggunakan perspektif analisis peran aktor yang terlibat dalam perubahan kebijakan yaitu **“Siapa saja aktor lokal (Kota Batam) yang terlibat dalam perubahan kebijakan dan peran dari masing-masing aktor.”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Siapa saja aktor-aktor lokal yang terlibat dalam formulasi kebijakan *Ex-Officio* di Kota Batam?
2. Bagaimana peran dari masing-masing aktor lokal yang terlibat dalam formulasi kebijakan *Ex-Officio* di Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi aktor lokal yang terlibat dalam formulasi kebijakan *Ex-Officio* di Kota Batam
2. Menganalisis peran aktor lokal yang terlibat dalam formulasi kebijakan *Ex-Officio* di Kota Batam

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada pengembangan Ilmu Pengetahuan Kebijakan Publik khususnya mengenai peran aktor dalam formulasi kebijakan otonomi daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Batam dalam kebijakan otonomi daerah yang berlaku yakni kebijakan Ex-Officio

b. Peneliti

Bagi peneliti diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam rangka memahami dan mendalami tentang peran aktor dalam formulasi kebijakan otonomi daerah serta menjadi bahan perbandingan bagi penelitian yang sejenis.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Peneliti Terdahulu

Tabel 1.2
Peneliti Terdahulu

Penulis, Tahun	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Temuan
Araujo, L. B. De, Sarwono & Rochmah, S. (2013). Dinamika Pembuatan Kebijakan Desentralisasi Di Timor-Leste. <i>WACANA : Jurnal Sosial Dan Humaniora</i> , 16(1), 52–64.	Deskriptif kualitatif	Mengetahui dinamika pembuatan kebijakan desentralisasi di Timor Leste meliputi isu desentralisasi, aktor-aktor yang terlibat dan agenda kebijakan yang dibahas	Pembuatan kebijakan ini merupakan tuntutan dari masyarakat untuk segera ditangani oleh pemerintah setempat. Namun dalam pembuatan kebijakan ini ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Aktor-aktor yang ikut terlibat belum memiliki pandangan orientasi yang sama dalam menyelesaikan masalah desentralisasi di Timor Leste yang masih mementingkan kepentingan politik dan organisasinya untuk merebutkan kekuasaan. Dalam penyusunan agenda kebijakan pemerintah menggunakan sosialisasi, realisasi program pembangunan dan konsultasi yang telah dilakukan. Akibat adanya ketidaksamaan orientasi dan kepentingan antar aktor menyebabkan pembahasan mengenai kebijakan desentralisasi ini ditunda
Salaputa, I., Madani, M.,	Deskriptif	Menggambarkan peran aktor	Aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan ini

<p>& Prianto, A. L. (2013). Peran Aktor Dalam Penyusunan Agenda Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Maluku Tengah. <i>Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan</i>, 3(1), 35–47.</p>	<p>kualitatif</p>	<p>dalam penyusunan agenda kebijakan serta pola hubungan interaksi atau orientasi dari para aktor</p>	<p>ialah pihak eksekutif, legislative dan kelompok lainnya. Pola hubungan yang terjadi ialah tiap aktor dominan mempengaruhi aktor lain dalam menentukan tujuan kebijakan</p>
<p>Kümmeth, J. A. (2015). <i>The Politics of Public Policy Decisions in Local Government in Uganda</i>. Dissertation. Bayreuth University.</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Menganalisis peran aktor non pemerintahan dan pemerintahan dalam kebijakan daerah di Uganda</p>	<p>Pemerintah daerah di Uganda beroperasi di bawah politik, ekonomi dan kondisi sosial, memiliki aktor-aktor yang terdiri dari aktor kuat di masing-masing dari tiga domain tersebut. Aktor-aktor inilah yang mengarahkan masalah kebijakan. Selain ketidakpastian, lingkungan politik dipenuhi dengan perebutan kekuasaan, penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang, perlindungan jaringan dan konsentrasi kekuasaan di eksekutif, yang melemahkan institusi formal. Para aktor telah menggunakan kekuasaan termasuk mencari hubungan dengan kantor tertinggi di negara ini untuk mempengaruhi keputusan kebijakan publik, baik Pemda dan aktor individu di dalamnya mencari cara eksternal untuk dukungan keuangan. Di sisi lain, susunan sosial terdiri dari aktor-aktor non-negara yang kuat seperti lembaga tradisional dan keagamaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran</p>

			masyarakat kurang berpengaruh dalam kebijakan ini
Febriyandi, D. (2015). Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah (Studi Di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara). <i>Jurnal Politik Profetik (JPP)</i> , 6(2), 68–88.	Deskriptif kualitatif	Mengetahui proses perumusan kebijakan pemekaran daerah dan peran aktor kebijakan yang terlibat	Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa pemekaran di Pulau Sebatik dilakukan bukan hanya atas dasar tuntutan masyarakat saja namun lebih kepada sebuah kebutuhan. Dalam perencanaan pemekaran ini, pemerintah setempat telah melengkapi, menyediakan dan melakukan segala syarat dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan pemekaran wilayah. Pada tahapan perumusan kebijakan, aktor-aktor yang ikut terlibat ialah pemerintah daerah setempat dalam hal ini adalah Kepala Desa Tanjung Karang dan Binalawan sebagai penghubung dalam penyampaian aspirasi serta pihak yang menyiapkan dan menyediakan berkas-berkas administrasi terkait pemekaran wilayah; Camat Sebatik dan Sebatik Barat yang berperan dalam memberikan dukungan untuk melakukan pemekaran wilayah; DPRD Nunukan sebagai aktor pemerintah yang memberikan pertimbangan, dukungan dan mediator antara pihak eksekutif dengan masyarakat setempat; dan Bupati Nunukan
Trisnawati, A., & Setiyono, B. (2015). Analisis Peran Aktor	Deskriptif kualitatif	Mengidentifikasi peran aktor dan kegiatan yang dilakukan dalam kebijakan pemekaran	Penelitian ini menjelaskan bahwa aktor yang terlibat dalam kebijakan pemekaran wilayah ini dibagi menjadi dua yakni aktor sebelum reformasi yang

<p>Dalam Pemekaran Kabupaten Brebes. <i>Journal of Politics and Government Studies</i>, 4(2), 1–21.</p>		Kabupaten Brebes	<p>telah diusulkan namun tidak diterima pada masa orde lama dan aktor sesudah reformasi yang terdiri dari masyarakat lokal, Kepala Desa dan BPD. Adapun peran yang dilakukan aktor berbeda-beda sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Kepala Desa dan BPD berperan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana akan dilakukannya pemekaran wilayah, melakukan kegiatan lobby bersama dengan Presidium. Sedangkan masyarakat berperan dalam mendukung dan memberikan masukan kepada pemerintah setempat terkait perencanaan pemekaran wilayah</p>
<p>Sanjaya. (2018). <i>Dinamika Aktor Dalam Upaya Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2014. JOM FISIP UNRI</i>, 5(2), 1–17.</p>	Deskriptif kualitatif	<p>Mengidentifikasi para aktor yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori Charles O. Jones dimana dalam kebijakan ini melibatkan beberapa Aktor. Baik aktor yang berperan Langsung maupun tidak langsung dan dari yang setuju maupun aktor yang tidak setuju dengan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur. Dimana aktor-aktor tersebut memiliki kepentingan yang berbeda- beda. Mulai dari kepentingan jangka pendek hingga kepentingan jangka panjang. Adapun aktor-aktor tersebut adalah: Bapak H. Huzrin Hood S.H., M.H., M.Pd.I., Katwanto, S.E., H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si., Ing. Iskandarsyah, Alm. H. M. Sani, Alm. Abdul Malik, Ihsan Muharal, S.H, dan Bapak Arfan. Aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan ini memiliki</p>

			kepentingan yang berbeda-beda
<p>Esa, R. F. (2016). Pertarungan Kepentingan Politik Dalam Perumusan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015. <i>Jurnal Politik Muda</i>, 5(2), 256–267.</p>	Deskriptif kualitatif	Mengetahui Stakeholders yang berperan dan hubungan antar stakeholders dalam perumusan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 serta proses penyusunan kebijakan	Aktor yang terlibat dalam kebijakan ini adalah politisi, teknokrat, birokrat dan partisipan lainnya yang memiliki kepentingan berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pekerjaan mereka. Politisi sebagai pihak yang membawa kepentingan masyarakat dalam perumusan kebijakan ini, teknokrat sebagai pihak yang tidak memihak pada siapapun karena biasanya pihak ini berasal dari akademisi dan birokrat yang membuat program kerja yang membutuhkan pembiayaan dalam melaksanakannya. Adapun hubungan yang terjadi antar aktor ialah saling bergantung satu sama lain
<p>Zaenuddin, M. & W. K. & S. S. & A. H. H. (2018). Identifikasi Permasalahan Pasca Diterapkan Otonomi Daerah di Kota Batam dan Alternatif Solusi Kebijakan Mendatang. <i>Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan</i>, 1095–1104.</p>	Deskriptif kualitatif	Mengetahui dualisme kewenangan yang terjadi di Kota Batam antara Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam	Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penerapan desentralisasi di Batam melahirkan dualisme antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Masalah ini mengakibatkan adanya ketidak konsistenan regulasi bagi masyarakat dan pihak usaha di bidang lahan, perijinan, pelabuhan dan bandara yang membuat menurunnya tingkat ekonomi di Kota Batam
<p>Fauzi, A. N. & D. R. (2018). Analisis Peran</p>	Deskriptif	Mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam formulasi	Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perumusan kebijakan Semarang smart city aktor yang terlibat

Aktor dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 7(4).	kualitatif	kebijakan Semarang <i>Smart City</i> serta peran dari masing-masing aktor	adalah pemerintah kota semarang sedangkan pihak swasta dan masyarakat kurang dilibatkan di dalamnya. Walikota Semarang memiliki peranan yang dominan sebagai pengambil keputusan sehingga perangkat daerah lainnya hanya sebagai pelaksana kebijakan saja. Swasta dan masyarakat hanya sebagai pengguna kebijakan dan memberikan respon atau masukan kepada pemerintah setempat mengenai kebijakan ini
--	------------	---	--

Sumber: Diolah Penulis, 2019

Penelitian mengenai peran aktor dalam formulasi kebijakan desentralisasi sudah pernah diteliti oleh peneliti lain, walaupun memiliki topik yang sama, namun terdapat perbedaan antara permasalahan penulis dengan penulis lainnya.

Penelitian Lucio Borromeo de Araujo dkk (2013) dilakukan untuk mengetahui aktor yang terlibat dan agenda kebijakan yang menjadi pembahasan. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan ini merupakan tuntutan dari masyarakat untuk segera ditangani oleh pemerintah setempat. Namun dalam pembuatan kebijakan ini ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Aktor-aktor yang ikut terlibat belum memiliki pandangan orientasi yang sama dalam menyelesaikan masalah desentralisasi di Timor Leste yang masih mementingkan kepentingan politik dan organisasinya untuk merebutkan kekuasaan. Selain itu dalam penyusunan agenda kebijakan pemerintah menggunakan sosialisasi, realisasi program pembangunan dan konsultasi yang telah dilakukan. Akibat adanya ketidaksamaan orientasi dan kepentingan antar aktor menyebabkan pembahasan mengenai kebijakan desentralisasi ini ditunda (Araujo, 2013). Letak persamaan penelitian ialah sama-sama meneliti dinamika pembuatan kebijakan desentralisasi yang melihat peran aktor dan agenda kebijakan yang dibahas. Perbedaan dari penelitian ini ialah penulis menyertakan aktor swasta dalam perumusan kebijakan sedangkan dalam penelitian Araujo tidak.

Penelitian Salaputra dkk (2013) dilaksanakan dengan tujuan ingin menggambarkan peran aktor dalam penyusunan kebijakan ini serta pola hubungan yang terjalin. Aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan ini ialah pihak eksekutif, legislative dan kelompok lainnya. Pola hubungan yang terjadi ialah tiap aktor dominan mempengaruhi aktor lain dalam menentukan tujuan kebijakan (Salaputra & M. Madani & A. Prianto, 2013). Penelitian Salaputra memiliki kesamaan dengan permasalahan penulis yaitu ingin menggambarkan peran aktor dalam penyusunan agenda kebijakan serta orientasi dari para aktor. Namun penelitian ini tidak menjelaskan secara spesifik peran aktor non pemerintahan dalam penyusunan kebijakan.

Penelitian Kummeth (2015) membahas bagaimana peran aktor non pemerintah dalam penyusunan kebijakan daerah di Uganda. Pemerintah daerah di Uganda beroperasi di bawah politik, ekonomi dan kondisi sosial, memiliki aktor-aktor yang terdiri dari aktor kuat di masing-masing dari tiga domain tersebut. Aktor-aktor inilah yang mengarahkan masalah kebijakan. Selain ketidakpastian, lingkungan politik dipenuhi dengan perebutan kekuasaan, penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang, perlindungan jaringan dan konsentrasi kekuasaan di eksekutif, yang melemahkan institusi formal. Para aktor telah menggunakan kekuasaan termasuk mencari hubungan dengan kantor tertinggi di negara ini untuk mempengaruhi keputusan kebijakan publik, baik Pemda dan aktor individu di dalamnya mencari cara eksternal untuk dukungan keuangan. Di sisi lain,

susunan sosial terdiri dari aktor-aktor non-negara yang kuat seperti lembaga tradisional dan keagamaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran masyarakat kurang berpengaruh dalam kebijakan ini (Kummeth, 2015). Letak persamaan penelitian ialah sama-sama meneliti peran aktor non pemerintahan dan pemerintahan dalam kebijakan daerah serta melihat aktor kebijakan dari tiga domain yaitu politik, sosial dan ekonomi. Perbedaan dari penelitian ini ialah Jane Ayeko Küm meth menyertakan lembaga tradisional dan keagamaan sedangkan peneliti tidak.

Penelitian Didi Febriyandi (2015) menghasilkan informasi bahwa pemekaran di Pulau Sebatik dilakukan bukan hanya atas dasar tuntutan masyarakat saja namun lebih kepada sebuah kebutuhan. Dalam perencanaan pemekaran ini, pemerintah setempat telah melengkapi, menyediakan dan melakukan segala syarat dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan pemekaran wilayah. Pada tahapan perumusan kebijakan, aktor-aktor yang ikut terlibat ialah pemerintah daerah setempat dalam hal ini adalah Kepala Desa Tanjung Karang dan Binalawan sebagai penghubung dalam penyampaian aspirasi serta pihak yang menyiapkan dan menyediakan berkas-berkas administrasi terkait pemekaran wilayah; Camat Sebatik dan Sebatik Barat yang berperan dalam memberikan dukungan untuk melakukan pemekaran wilayah; DPRD Nunukan sebagai aktor pemerintah yang memberikan pertimbangan, dukungan dan mediator antara pihak eksekutif dengan masyarakat setempat; dan Bupati Nunukan (Febriyandi, 2015). Letak persamaan penelitian ialah sama-sama meneliti

proses perumusan kebijakan desentralisasi yang melihat aktor kebijakan. Perbedaan dari penelitian ini ialah penulis, membahas tentang kebijakan yang dibuat untuk mengakhiri permasalahan yang diakibatkan dari penerapan otonomi daerah di Kota Batam sedangkan dalam penelitian Didi Febriyandi membahas tentang perumusan kebijakan pemekaran daerah.

Penelitian Akhpriyani Trisnawati dan B. Setyono (2015) menjelaskan bahwa aktor yang terlibat dalam kebijakan pemekaran wilayah ini dibagi menjadi dua yakni aktor sebelum reformasi yang telah diusulkan namun tidak diterima pada masa orde lama dan aktor sesudah reformasi yang terdiri dari masyarakat lokal, Kepala Desa dan BPD. Adapun peran yang dilakukan aktor berbeda-beda sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Kepala Desa dan BPD berperan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana akan dilakukannya pemekaran wilayah, melakukan kegiatan lobby bersama dengan Presidium. Sedangkan masyarakat berperan dalam mendukung dan memberikan masukan kepada pemerintah setempat terkait perencanaan pemekaran wilayah (Trisnawati, 2015). Letak persamaan penelitian ialah sama-sama meneliti proses perumusan kebijakan desentralisasi yang melihat aktor kebijakan. Perbedaan dari penelitian ini ialah penulis, membahas tentang kebijakan yang dibuat untuk mengakhiri permasalahan yang diakibatkan dari penerapan otonomi daerah di Kota Batam sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang perumusan kebijakan pemekaran daerah. Selain itu,

penulis menyertakan aktor privat dalam proses kebijakan namun tidak dengan penelitian yang dilakukan Trisnawati dan B. Setyono.

Penelitian Sanjaya (2018) menjelaskan aktor yang berperan secara langsung dan aktor yang terlibat secara tidak langsung dengan kepentingan yang berbeda-beda (Sanjaya, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu ingin mengetahui peran aktor secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan kebijakan. Letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Sanjaya ialah jenis permasalahan yang dibahas. Penulis membahas tentang kebijakan yang dibuat untuk mengakhiri permasalahan yang diakibatkan dari penerapan otonomi daerah di Kota Batam sedangkan dalam penelitian Sanjaya membahas tentang kebijakan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

Aktor yang terlibat dalam penelitian Radin Fadhillah Esa (2016) adalah politisi, teknokrat, birokrat dan partisipan lainnya yang memiliki kepentingan berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pekerjaan mereka. Politisi sebagai pihak yang membawa kepentingan masyarakat dalam perumusan kebijakan ini, teknokrat sebagai pihak yang tidak memihak pada siapapun karena biasanya pihak ini berasal dari akademisi dan birokrat yang membuat program kerja yang membutuhkan pembiayaan dalam melaksanakannya. Adapun hubungan yang terjadi antar aktor ialah saling bergantung satu sama lain (Esa, 2015). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan permasalahan penulis yaitu ingin menggambarkan peran

aktor dalam perumusan kebijakan. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian Radin Fadhillah Esa tidak menyertakan aktor swasta dan masyarakat di dalam penelitian ini.

Penelitian Zaenuddin dan Wahyudi (2018) menjelaskan bahwa dalam penerapan desentralisasi di Batam melahirkan dualisme antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Masalah ini mengakibatkan adanya ketidak konsistenan regulasi bagi masyarakat dan pihak usaha di bidang lahan, perijinan, pelabuhan dan bandara yang membuat menurunnya tingkat ekonomi di Kota Batam (Zaenuddin, 2018).

Penelitian Fauzi (2018) menjelaskan bahwa dalam perumusan kebijakan Semarang smart city aktor yang terlibat adalah pemerintah kota Semarang sedangkan pihak swasta dan masyarakat kurang dilibatkan di dalamnya. Walikota Semarang memiliki peranan yang dominan sebagai pengambil keputusan sehingga perangkat daerah lainnya hanya sebagai pelaksana kebijakan saja. Swasta dan masyarakat hanya sebagai pengguna kebijakan dan memberikan respon atau masukan kepada pemerintah setempat mengenai kebijakan ini (A. N. Fauzi & Dewi Rostyaningsih, 2018).

1.5.2 Administrasi Publik

Dimock (1992:20) dalam (Anggara, 2016:134) menjelaskan administrasi publik sebagai satuan ilmu yang membahas dan mempelajari kehendak rakyat dalam suatu permasalahan dan bagaimana cara mendapatkannya melalui pemerintah. Dwight Waldo (1996:17) dalam

(Syafiie, 2006:25) mengemukakan administrasi publik sebagai manajemen dan organisasi guna mencapai tujuan pemerintah. Kemudian Litchfield dalam (Syafiie, 2006:25) mengemukakan bahwasannya administrasi publik merupakan studi yang mempelajari kegiatan pemerintah mulai dari organisasi, sumberdaya, anggaran dan pimpinan.

Dapat disimpulkan bahwasannya administrasi publik adalah studi yang mempelajari bagaimana pemerintah dapat mencapai tujuan yang bersifat kenegaraan dengan fokus pada pelayanan menggunakan manajemen dan organisasi serta sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat.

1.5.2.1 Paradigma administrasi publik

Paradigma merupakan cara pandang seseorang atau sekelompok orang (Syafiie, 2006). Nicholas Henry dalam (Thoha, 2008:18-33) mengemukakan terdapat 6 (enam) paradigma Ilmu Administrasi Publik, yaitu:

Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1927)

Paradigma ini membahas mengenai letak keberadaan administrasi. Dalam paradigma ini mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki 2 fungsi yaitu fungsi politik dimana pusat perhatiannya terletak pada pembuat kebijakan sedangkan fungsi administrasi membrikan perhatiannya pada pelaksanaan kebijakan. Fokus yang dikembangkan dalam paradigma ini kurang dibahas secara rinci dan jelas sedangkan lokusnya terletak pada birokrasi pemerintah atau government birokrasi.

Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Lokus dari paradig ini ialah manajemen public yaitu *Planning, Organization, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting* sedangkan lokusnya tidak diungkapkan secara jelas.

Paradigma 3: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Adanya pertentangan anggapan mengenai administrasi yang bebas nilai dengan anggapan akan nilai yang bermuatan politik. Pada masa ini administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin sangat dominan dalam dunia administrasi publik.

Paradigm 4: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisa sistem riset operasi merupakan fokus dari paradigma ini dengan arah perkembangan berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologis sosial dan kebijakan public.

Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970an)

Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokusnya yang jelas. Fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan public dan kebijakan publik yang dipelajari dalam teori organisasi.

Paradigma 6: *Governance* (1990-Sekarang)

Pada paradigma ini menekankan pada perubahan konsep pemerintah dan administrasi. Perubahan ini dibagi dalam katagori globalisasi yaitu penggunaan internet dan ilmu teknologi, permasalahan lingkungan dan perdagangan internasional; redefinisi yaitu melakukan definisi ulang dimana kekuasaan dan kewenangan hirarki berubah menjadi kolaborasi; dan desentralisasi dengan mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam aktifitas pemerintah.

Jika dilihat dari penjelasan mengenai fokus dan lokus tiap paradigma administrasi publik di atas, maka penelitian ini merupakan paradigam keenam yaitu *governance*, dalam paradigma ini pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, menggunakan internet dan layanan teknologi dan menggunakan konsep kolaborasi dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.5.3 Kebijakan Publik

William Jenkis (Howlett dan Ramesh, 1995:5) dalam (Herabudin, 2016:21) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengambil keputusan oleh aktor politik dalam penyeleksian tujuan dan maksud kepentingan melalui proses pembuatan kebijakan publik.

RC. Chandler dan JC. Plano (1988) dalam (Syafiie, 2006:105) mengemukakan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya sumber daya yang ada untuk memecahkan permasalahan public. Sedangkan menurut Willy N. Dunn dalam (Syafiie,

2006:106) kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan.

Dari pengertian di atas dapat dirumuskan kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai aktor utama dalam pengambilan kebijakan sebagai tugas pemerintahan untuk memperoleh jawaban dalam memecahkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat luas.

Dunn (1995:26-29) dalam (Herabudin, 2016:56-58) memproyeksikan ruang lingkup studi kebijakan publik pada 5 (lima) fokus kajian studi kebijakan publik.

- a. Penyusunan agenda (agenda setting) dilakukan untuk memetakan isu kebijakan yang akan dibahas pemerintah
- b. Formulasi kebijakan sebagai tahap dalam merumuskan kebijakan
- c. Adopsi kebijakan merupakan tahap pengambilan keputusan atau tindakan
- d. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari keputusan atau kebijakan yang telah diambil
- e. Evaluasi kebijakan melakukan kegiatan pemantauan atau monitoring terhadap kebijakan yang dilakukan

1.5.4 Formulasi Kebijakan Publik

Menurut LAN RI (LAN, 2010:5) dalam (A. N. & D. R. Fauzi, 2018) formulasi kebijakan merupakan kegiatan untuk mencari alternative

yang akan diterapkan dalam menyelesaikan masalah publik. Menurut James Anderson (Subarsono, 2013:12-13) formulasi kebijakan adalah bagaimana pengembangan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah publik serta siapa saja yang berpartisipasi di dalamnya.

Berdasarkan definisi formulasi kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dalam menganalisis suatu masalah publik agar dapat menghasilkan suatu produk kebijakan yang baik serta sesuai dalam menangani permasalahan tersebut.

Samodra Wibawa (1994 dalam Subarsono, 2013) menyatakan komponen yang terdapat dalam proses formulasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan merupakan perilaku yang dilakukan secara berulang kali sehingga terbentuk norma dalam melakukan tindakan
- b. Aktor atau pembuat kebijakan (policy maker) adalah pelaku kebijakan
- c. Orientasi nilai menciptakan keseimbangan pada kepentingan yang berbeda dan berfungsi sebagai menciptakan nilai yang disepakati bersama pada penilaian rasional dalam mencapai hasil yang maksimal.

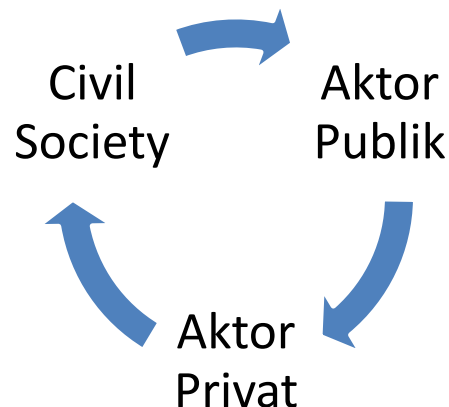
1.5.5 Aktor Perumus Kebijakan

Keterkaitan antara birokrasi dengan kebijakan pemerintah sangatlah erat baik secara langsung maupun tidak langsung. Asumsi keterkaitan ini didasari pada suatu fakta bahwa perancangan, implementasi hingga

evaluasi melibatkan aparatur birokrasi. Hal ini disebabkan birokrasi adalah aktor atau pelaku dalam formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pemerintah, sedangkan kebijakan pemerintah merupakan alat atau instrument bagi birokrasi yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (Herabudin, 2016:37).

Moore (1995) dalam (Herabudin, 2016:87) menjelaskan bahwa secara umum aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, yaitu aktor publik yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, aktor privat, dan aktor masyarakat (civil society) yang terdiri dari warga negara individu, partai politik, dan NGO's. Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik. Hubungan ketiga aktor tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar 1.2 Hubungan Aktor-Aktor dalam Formulasi Kebijakan Publik



Sumber: Moore (1995 dalam Winarno, 2002 dalam Herabudin, 2016:87)

1.5.6 Peran

Menurut Soekanto (2002:243) dalam (A. N. & D. R. Fauzi, 2018) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Biddle dan Thomas (1996:404-405) dalam (Herabudin, 2016) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu dalam istilah-istilah yang menyangkut:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; dibagi menjadi dua golongan yaitu:
 - 1) Aktor (pelaku) yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu
 - 2) Target (sasaran) atau orang lain (*others*) yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku; dibagi menjadi dua yaitu aktor primer atau utama, yaitu aktor merasakan perubahan dan dampak dari pelaksanaan keputusan kebijakan dan memiliki kepentingan dalam kebijakan dan aktor sekunder atau pendukung, yaitu aktor yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi namun tidak memiliki kepentingan dalam kebijakan.
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Selanjutnya menurut Nugroho (2014) dalam (Setiawan, 2020) stakeholders dapat diklasifikasikan perannya yaitu:

- a. *Policy Creator*, berperan dalam pengambil keputusan dan penentu kebijakan;

- b. Koordinator, berperan dalam memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran;
- c. Implementor, sebagai pelaksana kebijakan termasuk kelompok sasaran;
- d. Akselerator, berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

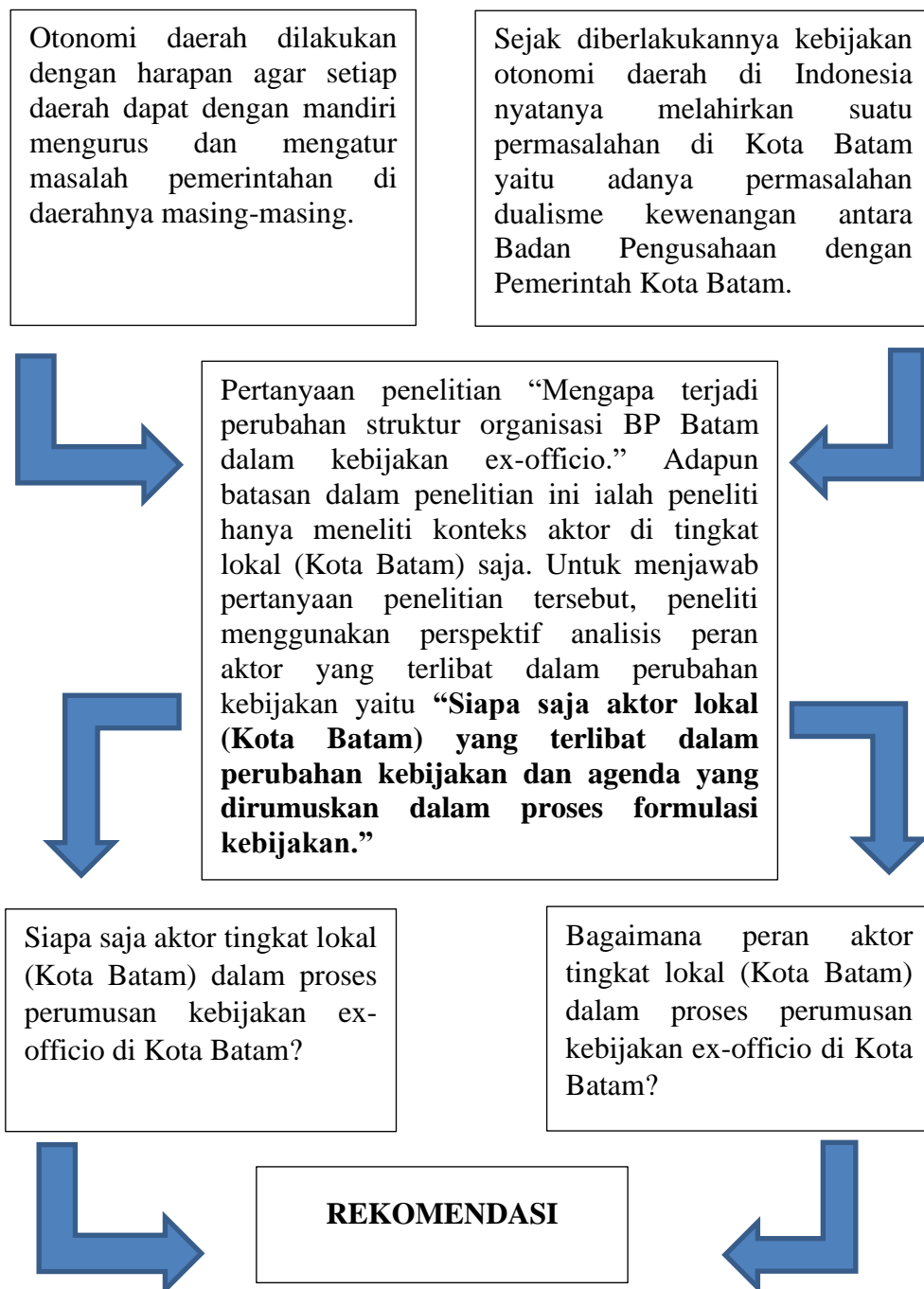
1.5.7 Desentralisasi

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *de*: lepas dan *centerum*: pusat. Rondinelli dan Cheema (1983) dalam (Herabudin, 2016) mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan perusahaan, pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Dengan adanya desentralisasi maka memunculkan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.

1.6 Kerangka Penelitian

Gambar 1.3

Kerangka Pemikiran Penelitian



1.7 Operasionalisasi Konsep

Formulasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan menggunakan teknik dan mekanisme yang tepat dalam menganalisis suatu masalah publik agar dapat menghasilkan suatu produk kebijakan yang baik serta sesuai dalam menangani permasalahan.

Aktor lokal adalah pelaku kebijakan yang berasal dari tingkat lokal atau daerah yang ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan memberikan dukungan ataupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan.

Peran merupakan pola tingkah laku atau suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor sesuai dengan kedudukan yang dimiliki.

Fenomena penulisan digunakan sebagai rujukan penulis dalam mendapatkan data dan informasi sesuai dengan alur pikir dan teori mengenai peran aktor dalam formulasi kebijakan. Adapun fenomena yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3

Fenomena dan Indikasi

Tujuan Penelitian	Fenomena	Indikasi yang Diamati
Tujuan 1: Identifikasi Aktor Lokal	Klasifikasi Aktor Lokal	a. Aktor lokal (<i>state</i> , <i>private</i> dan <i>civil society</i>) yang ikut terlibat dalam formulasi kebijakan <i>ex-officio</i> b. Aktor lokal yang setuju dengan kebijakan <i>ex-officio</i> di Kota Batam c. Aktor lokal yang tidak setuju dengan kebijakan <i>ex-officio</i> di Kota Batam d. Perubahan yang terjadi sejak diberlakukannya kebijakan <i>ex-officio</i> di Kota Batam
Tujuan 2: Analisis Peran Aktor	Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial Perilaku yang muncul dalam interaksi Kedudukan aktor dalam perilaku	Aktor (pelaku) yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu Target (sasaran) atau orang lain (<i>others</i>) yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya a. Harapan tentang peran (<i>expectation</i>) b. Perwujudan perilaku dalam peran (<i>performance</i>) c. Bentuk interaksi a. Aktor Primer, aktor yang merasakan perubahan atau dampak dari pelaksanaan keputusan kebijakan dan

		memiliki kepentingan dalam kebijakan
		b. Aktor Sekunder, merupakan aktor yang memiliki tingkat kepedulian yang tinggi tetapi tidak memiliki kepentingan dalam kebijakan
	Kaitan kedudukan aktor dan perilaku aktor	a. Implementor, sebagai pelaksana kebijakan
		b. Akselerator, yang berkontribusi dalam membantu dan mempercepat kebijakan agar sesuai dengan target capaian

Sumber: Diolah Penulis

1.8 Argumentasi Penelitian

Argumen penelitian berisi tentang jawaban atas perumusan masalah menurut teori-teori yang ada dalam literature, selain itu juga dibangun berdasarkan kerangka pemikiran teoritis. Kaitannya mengenai penelitian ini ialah, sebuah perubahan kebijakan (*policy change*) tidak selalu bisa mengatasi suatu permasalahan bahkan dapat melahirkan suatu permasalahan yang baru, seperti halnya di Kota Batam. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diharapkan bahwa setiap daerah dapat dengan mandiri mengurus permasalahan pemerintahan di daerahnya sendiri. Namun sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Kota Batam mengakibatkan adanya tumpang tindih atau dualisme yang terjadi antara Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Kota Batam.

Permasalahan dualisme ini kemudian diakhiri dengan menunjuk Walikota Batam merangkap jabatan Kepala Badan Pengusahaan Batam secara *ex officio*. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan *ex officio* ini malah membuat permasalahan yang baru, yaitu adanya perbedaan orientasi antara Pemerintah Kota dengan Badan Pengusahaan dimana Pemerintah Kota dengan orientasi sosial dan tidak mencari keuntungan sedangkan Badan Pengusahaan Batam dengan orientasi profit yaitu mencari keuntungan. Sehingga dikhawatirkan dengan adanya kebijakan ini dapat menyebabkan adanya *abuse of power* atau *super power* yang dilakukan oleh pimpinan *ex-officio* karena adanya kewenangan dalam menggunakan sumber daya yang besar baik sebagai kepala daerah dan kepala badan pengusahaan. Hal ini menunjukkan, jika perubahan kebijakan (*policy change*) dilakukan tidak selalu dapat menyelesaikan suatu permasalahan bahkan dapat melahirkan permasalahan yang baru.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Bog dan Taylor dalam (Moleong, 2007) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai kegiatan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan secara tertulis atau lisan yang diperoleh dari pengamatan fenomena penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif untuk mengidentifikasi aktor dan menganalisis peran aktor lokal yang terlibat dalam kebijakan *ex-officio* yang dijelaskan menggunakan kata-kata tertulis.

1.9.2 Situs Penelitian

Merupakan tempat penelitian di lakukan untuk memperoleh data dan informasi dari fenomena yang diamati (Moleong, 2010). Lokasi atau objek yang dipilih dalam penelitian ini berada di Kota Batam, Kepulauan Riau.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2010). Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah pelaku kebijakan di Batam, antara lain:

1. Kepala Badan Pengusahaan Batam Masa Transisi
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Batam
3. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Pengelolaan Perbatasan
4. Sekretaris Kepala Badan Pengusahaan Batam Masa Transisi
5. Kepala Humas, Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan Kota Batam
6. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam

1.9.4 Jenis Data

Penelitian deskriptif menekankan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif (Moleong, 2007). Dalam penelitian ini, jenis data yang

digunakan berupa kata-kata yang disusun dan dinarasikan dari hasil wawancara, observasi dan tinjauan pustaka.

1.9.5 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) dalam (Moleong, 2010) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni melakukan survey dan wawancara langsung dari subjek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian dan penelitian sebelumnya serta kajian buku.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Nazir (2005) dalam (Moleong, 2010) wawancara adalah kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi dengan cara tanya jawab menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun dalam mengamati fenomena penelitian. Narasumber dalam kegiatan wawancara ini ialah pelaku kebijakan di Batam antara lain: Kepala Badan Pengusahaan Batam Masa Transisi, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Batam, Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Pengelolaan Perbatasan, Sekretaris Kepala Badan Pengusahaan Batam Masa Transisi, Kepala Humas, Promosi dan

Protokol Badan Pengusahaan Kota Batam dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Batam.

2. Observasi

Observasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh peneliti adalah suatu penelitian dalam mengamati fenomena yang terjadi di lapangan. Observasi pada penelitian ini adalah melihat perubahan yang terjadi selama kebijakan *ex-officio* diterapkan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber dokumentasi ialah Buku Pembangunan Kota Batam dan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Batam.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2006) aktivitas dalam analisis data kualitatif ialah sebagai berikut:

1. Reduksi data dilakukan untuk menseleksi atau memilah data mentah menjadi sebuah informasi yang bermakna
2. Penyajian data dilakukan untuk menyajikan data dalam bentuk narasi sehingga terbentuk informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah untuk dipahami

3. Verifikasi merupakan langkah akhir dalam menganalisis suatu data kualitatif. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan sebagai bentuk jawaban dari permasalahan.

1.9.8 Kualitas Data

Teknik yang digunakan dalam menilai kualitas data dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data (Moleong, 2010). Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dimana menggali kebenaran menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara dan observasi.